

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Berakhirnya Perang Dunia II ditandai dengan menyerahnya Jerman kepada Sekutu di Eropa dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa tersebut sebagai akibat dari dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Dalam situasi yang demikian pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Nasional Indonesia*, Reid (1996: 15) mengungkapkan bahwa “Berita tentang proklamasi kemerdekaan disebarkan ke seluruh Jawa dalam beberapa jam oleh para pemuda Indonesia melalui kantor-kantor berita dan telegraf Jepang”. Kekuatan asing berikutnya setelah Jepang yang harus dihadapi oleh Republik Indonesia (RI) adalah pasukan-pasukan Sekutu yang telah keluar sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Mereka bertugas untuk kembali menduduki wilayah Indonesia dan melucuti tentara Jepang, tugas tersebut dilaksanakan oleh Komando Asia Tenggara atau *South East Asia Command* (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Ia kemudian membentuk suatu komando khusus yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI).

Tentara Sekutu mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 di bawah pimpinan Sir Philip Christison. “Pendaratan kemudian dilakukan di Padang, Medan, dan Bandung pada tanggal 13 Oktober 1945 serta di Surabaya

pada tanggal 25 Oktober 1945” (Kansil, 1988: 46). Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu datang dengan membawa orang-orang *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Hindia Belanda, sikap Indonesia berubah menjadi curiga dan kemudian bermusuhan. Situasi dengan cepat memburuk setelah NICA mempersenjatai kembali bekas *Koninklijk Netherlands-Indisch Leger* (KNIL) yang baru dilepaskan dari tahanan Jepang. Dalam bukunya yang berjudul *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 1*, Sudharmono (1981: 45) mengatakan bahwa “Orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mulai memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi”.

Sementara itu, pasukan Inggris sejak bulan Februari 1946 berangsur-angsur meninggalkan Indonesia. Setelah seluruh pasukan Inggris ditarik oleh pihak Sekutu, konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda dihadapi oleh kedua belah pihak dengan jalan diplomasi dan bertempur. Dalam hal diplomasi, kedua belah pihak pertama kali mengadakan perundingan di Linggajati. Bagi pihak Belanda, perundingan itu bukan sekedar taktik diplomasi, tetapi dimaksudkan pula untuk memiliki kesempatan mendatangkan pasukan sejumlah yang diperlukan. Tanggal 15 November 1946, naskah Perundingan Linggajati ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak. Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn (Komisi Jenderal). Sementara Lord Killearn wakil pemerintah Inggris bertindak sebagai penengah. Akan tetapi naskah perundingan itu tidak

berpengaruh terhadap ketegangan antara pasukan kedua belah pihak menjadi mereda. Hal itu disebabkan oleh sikap dan tindakan pihak Belanda sendiri. Mereka yang meminta berunding, tetapi mereka pula yang melanggar perundingan.

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militernya yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda 1. Perlawanan terhadap Belanda, selain terjadi di sekitar Jakarta dan Karawang, berlangsung pula di beberapa daerah lain di Jawa Barat, seperti di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan lain-lain. Sumantapura dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Purwakarta*, mengatakan bahwa “Di Purwakarta pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda menjatuhkan bom di Dipu Stasiun Purwakarta, Gedung Mesiu, dan kantor Telepon Purwakarta sekitar pukul lima sore” (Sumantapura, 2000: 10). Aksi militer yang dilakukan oleh Belanda tersebut memaksa rakyat dan tentara yang ada di Purwakarta untuk melawannya dengan taktik gerilya.

Belanda seringkali menjadi kalang-kabut dan terdesak mundur jika dihadapkan dengan perlawanan gerilya. Dalam kondisi demikian, pihak Belanda selalu meminta untuk diadakan perundingan. Di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN), kedua belah pihak mengadakan perundingan di atas kapal laut “Renville” yang berlabuh di pantai Jakarta. Perundingan mulai berlangsung tanggal 8 Desember 1947. Naskah Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian itu berisi dua pokok persetujuan, yaitu persetujuan gencatan senjata dan penyelesaian sengketa politik antara pemerintah pendudukan

Belanda dengan pemerintah RI. Menurut perjanjian itu, Jawa Barat termasuk wilayah kekuasaan Belanda. Di bidang militer hal itu berarti kantong-kantong gerilya yang telah dibentuk dengan susah payah, harus ditinggalkan oleh pasukan TNI/Siliwangi, karena kantong-kantong gerilya itu menjadi berada di belakang garis demarkasi (Garis van Mook). Perintah hijrah dikeluarkan oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel A.H. Nasution. Dalam karyanya yang berjudul *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*, Dirdjosisworo (1994: 129) mengatakan bahwa “Pada tanggal 22 Pebruari 1948 telah selesai dihijrahkan kira-kira 29.000 prajurit Siliwangi dari kantong-kantong gerilyanya”.

Bagi rakyat Jawa Barat, pelaksanaan hijrah pasukan Siliwangi berarti mereka kehilangan pelindung utama dari ancaman musuh. Hal itu disadari betul oleh TNI, badan perjuangan dan laskar rakyat. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan dan laskar-laskar rakyat, antara lain Hizbullah dan Sabilillah, bahkan sebagian kecil pasukan Siliwangi, tidak mematuhi perintah hijrah. “Waktu itu kekuatan pasukan Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat berjumlah lebih-kurang 2000 orang” (Hardjasaputra, 2004: 142). Mereka menyusun kekuatan dan mengatur strategi untuk melanjutkan gerilya melawan Belanda. Sebaliknya pihak Belanda pun berupaya menjadikan daerah Jawa Barat sebagai tandingan untuk menghadapi Pemerintah RI dalam percaturan politik. Untuk kepentingan itu, Belanda merangkul dan memprovokasi warga Jawa Barat yang berhaluan federal, agar mereka mendukung pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara federasi, sesuai dengan keputusan Perundingan Linggajati dan Perjanjian Renville. Salah satu pasal dalam keputusan Perjanjian Renville menyatakan,

bahwa sebelum RIS dibentuk, pihak Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Pasal itulah yang memberi jalan bagi pembentukan Negara Pasundan.

Purwakarta termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Negara Pasundan. Dengan demikian terjadi kekosongan kepemimpinan, karena Bupati Juwarsa telah “menyeberang” ke pihak Belanda. Kemudian kedudukan kepemimpinan diganti oleh Bupati Danta Ganda Wikarma, beliau melakukan inspeksi keliling daerah. Inspeksi itu berakhir di pusat konsentrasi gerilya di daerah Purwadadi (Subang). Akan tetapi beberapa waktu kemudian, Bupati Danta tertangkap oleh Belanda dan ditawan di penjara Kebonwaru Bandung sampai meninggal. Sejumlah tokoh Purwakarta yang duduk dalam pemerintahan Kabupaten Karawang Timur, berusaha untuk mencegah terjadinya *vakum* kekuasaan. Hardjasaputra (2004: 144) mengatakan “Mereka membentuk Satuan Pemberontak dengan kode 88 selanjutnya nama satuan itu disingkat menjadi SP 88 dipimpin oleh Letnan Kolonel Usman Sumantri”. Pimpinan SP 88 mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dalam upaya mengkonsolidasikan unsur pemerintahan di Purwakarta.

Gejolak perjuangan di Purwakarta untuk mempertahankan kemerdekaan makin meningkat setelah berdirinya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), BKR Komandemen I Jawa Barat, dan Satuan Pemberontak 88. Setelah TNI dari Jawa Barat khususnya Purwakarta pindah ke Jogja, TNI tidak boleh berada di Jawa Barat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sumantapura (2001: 144) “TNI *Field Preparation* Barisan Hitam 88 namanya diubah menjadi Satuan

Pemberontak 88 atau dikenal dengan SP 88". Hal ini dibenarkan oleh komando pusat di Yogyakarta yang mengatakan bahwa TNI yang tidak ikut hijrah, bersatu dengan rakyat melanjutkan perjuangan jika Belanda kembali melanggar kesepakatan yang telah ditentukan.

Permasalahan menarik yang perlu peneliti kaji yaitu mengapa di Purwakarta terbentuk SP 88, pembentukannya dilakukan oleh rakyat atau oleh TNI, badan perjuangan ini merupakan badan perjuangan rakyat atau badan perjuangan bagian dari TNI. Permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana upaya yang dilakukan SP 88 dalam menghimpun kekuatan, anggota dari satuan ini berasal dari rakyat atau dari TNI, jika dari keduanya bagaimana cara mereka dalam perekrutan anggota. Kemudian bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan SP 88, perlawanannya itu bersifat langsung berhadapan atau dengan taktik gerilya, apakah seluruh anggota SP 88 melakukan perlawanan bersenjata atau ada taktik lain yang mereka lakukan. Permasalahan terakhir yaitu bagaimana keberlanjutan perjuangan SP 88 setelah kembalinya TNI dari Jawa Tengah, perjuangan dari satuan ini selanjutnya bersatu dengan TNI atau tetap berjuang sendiri dengan nama SP 88, bagaimana nasib seluruh anggota dari SP 88, baik anggota yang berasal dari rakyat maupun anggota yang berasal dari TNI.

Peranan Masyarakat Purwakarta setelah dibentuknya Satuan Pemberontak 88 dalam mempertahankan kemerdekaan RI merupakan sebuah bukti historis. Akan tetapi masih sedikit peneliti sejarah yang mengungkap peranan dan perjuangannya pada masa perang kemerdekaan. Hal ini dikarenakan fokus kajiannya termasuk ke dalam lingkup sejarah lokal, kajian sejarah lokal biasanya

kurang diminati oleh peneliti sejarah dikarenakan kesulitan mendapatkan sumber dan menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lokasi kecil, desa atau kota kecil, pada umumnya tidak mempunyai dampak luas sehingga dianggap tidak penting karena tidak mempunyai dampak nasional atau representatif bagi perkembangan nasional.

Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan di atas ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERANAN SATUAN PEMBERONTAK 88 PADA MASA REVOLUSI FISIK DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 1946-1949”**. Adapun alasan penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah, yaitu *pertama*, mengkaji tentang perlawanan masyarakat Purwakarta khususnya peranan Satuan Pemberontak 88 pada masa revolusi fisik merupakan pembahasan sejarah lokal yang sangat menarik, karena di setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari sudut ruang dan waktu. *Kedua*, masih kurangnya penulisan tentang sejarah Purwakarta khususnya pada masa revolusi fisik. *Ketiga*, masih banyak masyarakat Purwakarta yang belum mengetahui tentang bagaimana perjuangan dan peranan masyarakat Purwakarta dalam mempertahankan kemerdekaan.

Kurun waktu yang peneliti angkat adalah tahun 1946-1949, karena terhitung tahun 1946 tentara Sekutu mulai meninggalkan daerah-daerah yang didudukinya dan diganti oleh tentara Belanda, hal tersebut memicu keresahan masyarakat Indonesia khususnya di daerah Purwakarta. Sedangkan tahun 1949 dijadikan akhir kajian karena pada waktu itu terjadi peristiwa penyerahan kedaulatan di Purwakarta. ”Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penyerahan

kedaulatan di Karesidenan yang dihadiri dari pihak TNI yaitu Letkol Sambas Atmadinata dan dari pihak sipil hadir Residen Jakarta Mh. Mumin” (Sumantapura, 2001: 204).

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah utama yang akan diangkat dalam kajian penulisan, yaitu “Bagaimana Peranan Satuan Pemberontak 88 Dalam Melawan Belanda Pada Masa Revolusi Fisik di Kabupaten Purwakarta Tahun 1946-1949?”. Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini dibatasi dalam beberapa pertanyaan.

1. Mengapa di Purwakarta terbentuk Satuan Pemberontak 88?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Pemberontak 88 dalam menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda?
3. Bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Satuan Pemberontak 88 selama berlangsungnya revolusi fisik?
4. Bagaimana keberlanjutan perjuangan Satuan Pemberontak 88 setelah kembalinya TNI dari Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu “Menjelaskan Peranan Satuan Pemberontak 88 Dalam Melawan Belanda Pada Masa Revolusi Fisik di

Kabupaten Purwakarta Tahun 1946-1949”. Sedangkan yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya Satuan Pemberontak 88 di Purwakarta.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satuan Pemberontak 88 dalam menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda.
3. Menguraikan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Satuan Pemberontak 88 selama berlangsungnya revolusi fisik.
4. Menjelaskan keberlanjutan perjuangan Satuan Pemberontak 88 setelah kembalinya TNI dari Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yaitu, dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat dibangku perkuliahan, dengan cara penelitian dan mengamati langsung ke lapangan, yang kemudian disusun menjadi suatu karya tulis ilmiah.
2. Bagi masyarakat Purwakarta yaitu, menambah perspektif baru mengenai bagaimana perjuangan masyarakat Purwakarta khususnya peranan Satuan Pemberontak dalam mempertahankan kemerdekaan, sehingga dapat menjadi perbandingan untuk mereka dalam menghadapi kekuatan asing untuk sekarang dan masa yang akan datang.

3. Bagi pemerintah daerah yaitu, memberikan perhatian agar pemerintah dapat mendukung penulisan sejarah lokal di Purwakarta, karena selain untuk menggali peristiwa-peristiwa lokal yang ada di Purwakarta juga secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi perkembangan kabupaten Purwakarta.
4. Bagi dunia pendidikan yaitu, dapat menambah pengetahuan baru mengenai sejarah lokal khususnya mengenai masa revolusi fisik di Purwakarta dan juga dapat dijadikan sumber bacaan dan sumber rujukan bagi para pelajar yang membacanya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami penulisan ini, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti mengungkapkan latar belakang masalah penelitian, yakni gambaran umum mengenai tema yang akan dikaji serta alasan pemilihan tema penelitian. Setelah itu dimuat rumusan masalah utama yang akan dibahas, kemudian adanya fokus pertanyaan yang ditulis yang bertujuan agar pembahasan dalam penelitian yang akan diangkat ini tidak meluas dari masalah utama yang telah ditetapkan. Bab ini juga memuat tujuan penulisan yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Kemudian dijelaskan beberapa manfaat yang diharapkan setelah adanya penelitian ini. Bagian selanjutnya adalah sistematika penulisan yang menguraikan mengenai urutan penulisan skripsi dari awal sampai akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoretis, dalam bab ini akan diuraikan dan dikaji mengenai beberapa konsep dan teori yang relevan dengan tema penelitian, kajian pustaka ini digunakan penulis sebagai landasan berfikir dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan. Kemudian penulis akan mengemukakan penjelasan mengenai konsep-konsep yang relevan dengan tema yang akan diangkat, serta menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup beberapa teori yang akan dipakai dalam membuat analisis. Masih sedikit yang membahas lengkap sesuai dengan judul yang peneliti angkat, tetapi peneliti menggunakan referensi yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian. Pertama, persiapan penelitian yang terdiri dari pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan penelitian, kemudian konsultasi dan mengurus perizinan. Kedua adalah pelaksanaan penelitian serta melakukan kritik sumber baik internal maupun eksternal. Ketiga yaitu penafsiran atau interpretasi dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan terakhir adalah melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi.

Bab IV Perjuangan Satuan Pemberontak 88 Pada Masa Revolusi Fisik di Purwakarta, bab ini menguraikan penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai peranan tentara dan masyarakat pada masa revolusi fisik di kabupaten Purwakarta, khususnya peranan Satuan Pemberontak 88. Pembahasan dalam bab ini ditulis berdasarkan sumber tertulis yang diperoleh dan dari hasil wawancara, studi dokumentasi maupun studi kepustakaan.

Bab V Kesimpulan, pada bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan terhadap beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Tentunya setelah menganalisis semua fakta dengan didukung oleh berbagai literatur yang telah dibaca.

